

ANGGARAN – PENDAPATAN - DAN BELANJA
2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 1, LD. 2011/NO. 1 KAB. ACEH BESAR:6 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bersama Bupati Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh, penyempurnaan sebagaimana dimaksud, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBK Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maka dengan itu perlu dibentuk suatu Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2011.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.107/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.07/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, Qanun Nomor 2 Tahun 2006.
- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Februari 2011.
2011;